

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan iklim sebagai fenomena global merupakan salah satu isu lingkungan terbesar beberapa tahun terakhir ini. Dampak perubahan iklim adalah meningkatnya suhu di bumi secara global atau sering disebut pemanasan global (*global warming*). Perubahan iklim terjadi karena gas rumah kaca (GRK) hasil aktivitas manusia terus bertambah di atmosfer bumi. Seperti dikutip dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* atau IPCC (2007) terdapat kenaikan rata-rata suhu permukaan global dengan laju $0,74^{\circ}\text{C} \pm 0,18^{\circ}\text{C}$ di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dampak perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini meliputi kenaikan suhu permukaan, perubahan cuaca hujan, kenaikan suhu dan tinggi air laut, peningkatan iklim dan cuaca ekstrim (Bappenas, 2014).

Menurut Griffiths dkk., (2007) pemanasan global dan risiko perubahan iklim diakui secara internasional sebagai masalah yang signifikan bagi perusahaan. Isu yang berkembang akhir-akhir ini mengenai pemanasan global juga sangat berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Sektor energi yang sebelumnya tidak menjadi sorotan ternyata menyumbang emisi gas rumah kaca besar. Pendataan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) mengungkapkan bahwa pada tahun 2013, total emisi

karbon dioksida dari energi sebesar 494.998.490 ton. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca di sela Seminar Perubahan Iklim bertema “Implementasi di Tingkat Nasional dan Persiapan Menuju COP 21 Paris” pada Jumat (3/7/2015) mengungkapkan bahwa emisi paling besar berasal dari batubara dan transportasi (www.sainskompas.com, 2015)

Pengungkapan emisi karbon dikembangkan sebagai perlakuan akuntansi atas isu-isu tersebut, dengan menyajikan pendekatan perusahaan tentang karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan di dalam *annual report*, dan dengan adanya pengungkapan tersebut perusahaan dapat melakukan pencegahan atau cara untuk mengurangi emisi karbon (Pratiwi dan Sari, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Protokol Kyoto, telah meratifikasi Protokol Kyoto pada 3 Desember 2004 melalui UU No. 17 Tahun 2004 dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta ikut serta dalam upaya menurunkan emisi GRK global. Terdapat 6 GRK yang ditargetkan penurunannya dalam Protokol Kyoto yaitu (CO₂), (CH₄), (N₂O), (SF₆), (PFC), dan (HFC) (Jannah dan Muid, 2014). Penelitian ini berfokus pada salah satu GRK yaitu CO₂ (emisi karbon) perusahaan yang merupakan penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim global.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dalam Perpres No.61 Tahun 2011. RAN-GRK mengungkapkan bahwa industri merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Industri

diharapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka sebagai realisasi dari *Corporate Social Responsibility* (Pradini, 2013). Dwijayanti (2011) juga menjelaskan bahwa pelaporan *carbon accounting* perusahaan dapat diintegrasikan dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Pelaporan *carbon accounting* dimasukkan sebagai voluntary disclosure perusahaan dan menjadi bagian dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Melalui pelaporan ini, *stakeholder* dapat menilai peran serta perusahaan dalam mengurangi GRK dan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, sehingga usaha perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dengan *carbon accounting* sejalan dengan konsep CSR (Pratiwi dan Sari, 2016).

Saat ini perusahaan-perusahaan di dunia secara bertahap mulai mempertimbangkan risiko yang cukup material terkait perubahan iklim, baik dampak langsung secara fisik terhadap bisnis mereka atau melalui kebijakan perubahan iklim yang mengubah pola konsumsi masyarakat (Luo, dkk., 2013). Oleh karena itu, timbul permintaan dari para *stakeholder* bahwa perusahaan perlu mengungkapkan informasi terkait emisi karbon (*carbon emission disclosure*) untuk menilai kinerja perusahaan. Pengungkapan karbon perusahaan sering disajikan sebagai bentuk pengungkapan sukarela yang berguna untuk pengambilan keputusan internal dan eksternal (Andrew dan Cortese, 2011). Karena perusahaan yang melakukan pengungkapan karbon akan memberi kemudahan *stakeholder* dalam mempertimbangkan keputusan

tentang keadaan kinerja emisi karbon perusahaan, menekan perusahaan untuk mengurangi emisi karbon, berkontribusi terhadap perdebatan publik tentang kebijakan dan regulasi perubahan iklim (Ennis dkk., 2012). Informasi mengenai emisi karbon dapat kita lihat di dalam annual report atau dalam *sustainability report* perusahaan.

Fenomena yang terjadi seperti ternyata dari top 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, baru 30% perusahaan yang membuat *Sustainability Report* (SR). Sedangkan dari tahun 2000 sampai saat ini, baru ada 97 perusahaan yang melakukan reporting melalui *Global Report Initiative* (GRI). *Country Program Manager* GRI di Indonesia, Bob Eko Kurniawan menjelaskan bahwa ada desakan dari investor khususnya investor yang dari luar agar perusahaan yang sudah terbuka (*listed company*) membuat laporan keberlanjutan. Investor luar dijelaskannya sudah mulai terdidik dalam hal keberlanjutan. Dengan membuat laporan keberlanjutan ini, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan investor. Reputasinya juga akan lebih baik untuk perusahaan, sehingga investor akan lebih tertarik kepada mereka. Indonesia peringkatnya memang lebih besar dibandingkan South East Asia, Amerika Latin dan Afrika, karena populasi Indonesia cukup banyak dan tingkat korporasinya lebih maju. Namun dibandingkan dengan Eropa dan Amerika, Indonesia masih kalah (www.majalahcsr.id, 30 Oktober 2017).

Dari fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam membuat *sustainability report* masih rendah dibandingkan

Eropa dan Amerika. Alasan pertama mungkin dikarenakan, banyak perusahaan yang belum mengetahui bahwa laporan keberlanjutan diwajibkan dalam undang-undang (Daniri, 2008). Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 66 ayat (2) butir (c), telah mengatur secara tegas agar perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Selain itu pelaporan non keuangan secara umum telah diakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK No.1 menyatakan tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri di mana lingkungan hidup memegang peranan penting. Untuk itu sudah selayaknya perusahaan melaporkan semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat. Alasan kedua, pembuatan laporan keberlanjutan hanya pemborosan biaya, karena banyak materi yang sama dengan laporan tahunan. Menurut Brammer dan Pavelin (2008) perusahaan yang profitable menyediakan sumberdaya yang cukup untuk membayar biaya pengungkapan lingkungan. Sebaliknya perusahaan yang kurang profitable, menyebabkan perusahaan lebih cenderung berfokus pada pencapaian tujuan keuangan, sehingga membatasi kemampuannya dalam usaha pencegahan dan pengungkapan emisi karbon (Luo, dkk., 2013).

Fenomena lainnya seperti, aktivitas operasional PT. Indah Kiat Pulp and Paper kertas menyebabkan kerusakan lingkungan dengan tercemarnya

udara, air dan tanah. Kondisi ini dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Koto Gasib yang bermukim dekat dengan perusahaan bubur kertas ini. “Perkembangan industri pulp and paper selain menyebabkan hilangnya tutupan hutan dari perluasan hutan tanaman industri juga menimbulkan pencemaran udara, air dan tanah akibat dari pembuangan limbah pabrik. Pemerintah harus melakukan peninjauan ulang terhadap izin AMDAL yang diberikan. Seharusnya perusahaan besar seperti Indah Kiat lebih memperhatikan aspek lingkungan,” ujar Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif WALHI Riau. Polusi dari aktivitas pabrik ini merupakan fakta yang tak terbantahkan, dengan adanya ekspansi dan perluasan pabrik secara berkelanjutan, mengakibatkan ketidakseimbangan daya serap lingkungan dengan polusi udara yang mereka hadirkan. Emisi dan bau tak sedap yang dihasilkan Indah Kiat menjadi hirupan biasa oleh warga Kota Perawang, hal ini menjadi fakta bahwa perusahaan tidak ramah pada lingkungan. Perusahaan yang beroperasi sejak tahun 1984 ini melakukan perluasan yang tidak diimbangi dengan kemampuan dan daya tampung lingkungan, menimbulkan banyak permasalahan lingkungan dan dampak kesehatan terhadap masyarakat sekitar. Guna menggesakan penyelesaian konflik ini, WALHI Riau dan LMR secara tegas menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan peninjauan, pemeriksaan, dan menghentikan pembangunan dan ekspansi PT Indah Kiat Pulp (www.walhi.or.id, 26 April 2017).

Dari fenomena tersebut, masyarakat akan memberikan tekanan kepada perusahaan ketika ada kegiatan perusahaan yang langsung berdampak pada lingkungan. Seharusnya PT Indah Kiat Pulp sebagai perusahaan besar lebih memperhatikan dampak lingkungan dan melakukan pengungkapan lingkungan agar timbul kepercayaan dari masyarakat bahwa perusahaan telah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Menurut Archel (2003) perusahaan yang besar yang mendapat perhatian lebih dari publik, mengarah pada pengungkapan informasi mengenai lingkungan dengan tingkat yang lebih tinggi agar dapat mengantisipasi dan menyelesaikan konflik.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon memiliki beberapa pertimbangan yaitu diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder* karena dianggap sudah bertanggungjawab terhadap lingkungan, menghindari ancaman-ancaman terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca yang tinggi, ancaman tersebut meliputi peningkatan operating costs, pengurangan permintaan (*reduced demand*), risiko reputasi (*reputational risk*), proses hukum (*legal proceedings*), serta denda pinalti (Berthelot dan Robert, 2011).

Carbon emission disclosure tentunya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu variabel yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan dari aspek keuangan. Menurut Choi dkk. (2013) perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik akan

mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk menahan tekanan eksternal. Jannah dan Muid (2014) yang meneliti tentang pengaruh media exposure, tipe industri, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage* dan peringkat PROPER terhadap *carbon emission disclosure* menemukan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Hal serupa juga ditemukan oleh Cahya (2016) yang menemukan bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki (Choi dkk., 2013). Perusahaan yang memiliki sumber daya lebih besar akan lebih mampu dan lebih cepat menyediakan informasi pada pihak eksternal. Sehingga antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil potensi untuk menyediakan pengungkapan emisi karbon lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan berukuran besar. Stanny dan Ely (2008), Prado- Lorenzo dkk., (2009), Luo dkk., (2010), Tang dan Luo (2011), Gallego-Álvarez (2010), Ghomi dan Leung (2013), Choi dkk., (2013), Eleftheriadis dan Anagnostopoulou (2014), dan Jannah dan Muid (2014) menemukan bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif pada pengungkapan emisi karbon.

Leverage juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure*. Menurut Ang (1997) rasio ini menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total ekuitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya (bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang).

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pihak kreditur yang akan memaksa perusahaan untuk melunasi hutang tersebut dengan sumber dana yang tersedia dibandingkan dengan melakukan pengungkapan emisi karbon yang akan menghasilkan biaya yang lebih besar dan dapat menjadi beban bagi perusahaan (Choi, et al 2013). Clarkson dkk., (2008), Luo dkk., (2013), Jannah dan Muid (2014) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*.

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga *leverage* ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure* yaitu afiliasi politik dan proporsi dewan komisaris independen. Fan dkk., (2007) menyatakan perusahaan disebut memiliki afiliasi politik apabila salah satu pimpinan perusahaan seperti dewan komisaris, direktur, dan sekretaris memiliki salah satu kriteria berikut ini: 1) rangkap jabatan sebagai politisi

yang berafiliasi dengan partai politik; 2) rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah; 3) rangkap jabatan sebagai pejabat militer; 4) mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer. Seseorang yang memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan dimana ia juga memiliki hubungan politik maka ia akan menjaga reputasinya sebagai orang yang terpandang dan dikenal oleh banyak orang. Untuk menjaga reputasinya dan memberikan citra yang baik pada masyarakat ia akan mencegah masalah yang mungkin dapat mencoreng reputasinya. Salah satu masalah yang mungkin terjadi yaitu masalah yang ditimbulkan akibat kelalaian perusahaan terhadap lingkungan, maka dari itu pengungkapan sukarela dan lingkungan yang termasuk didalamnya yaitu *carbon emission disclosure*.

Selanjutnya yaitu proporsi dewan komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta komisaris independen bebas dari korelasi bisnis atau korelasi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen atau bertindak dengan niat mendahulukan kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Gray, dkk.,(1995) mengatakan bahwa informasi yang diungkapkan kepada *stakeholder* merupakan legitimasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan. Dewan komisaris independen sebagai pengawas cenderung menyadari bahwa pengungkapan lingkungan dengan sukarela dapat digunakan untuk mempertahankan legitimasi

perusahaan. Liao dkk., (2014) menemukan bahwa adanya hubungan yang positif antara dewan komisaris independen dengan pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, praktik pengungkapan emisi karbon di negara berkembang masih bersifat sukarela. Oleh karena itu, banyak faktor yang dapat menjadi motivasi dan insentif perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor tekanan eksternal (pemicu) dan faktor kendala/penghambat yang mempengaruhi luas pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan.

Mengacu dari penelitian terdahulu dan mengembangkan model penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Muid (2014) maka penelitian ini mencoba untuk meneliti kembali penelitian tersebut dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Afiliasi politik dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Carbon Emission Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)”**.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengganti sampel perusahaan yang sebelumnya menggunakan seluruh perusahaan non-keuangan menjadi pertambangan. Perusahaan pertambangan dipilih sebagai sample oleh peneliti dikarenakan masih jarang ditelitinya *carbon emission disclosure* pada perusahaan pertambangan. Selain mengganti sample perusahaan, peneliti juga memperbarui tahun sample penelitian yang

sebelumnya menggunakan data tahun 2010-2012 menjadi 2014-2016. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Muid (2014) adalah menambahkan variabel afiliasi politik dan proporsi dewan komisaris. Variabel afiliasi politik dipilih karena peneliti tertarik dengan variabel tersebut serta variabel tersebut belum pernah diteliti pengaruhnya terhadap *carbon emission disclosure*, dan variabel proporsi dewan komisaris dipilih oleh peneliti karena variabel tersebut masih jarang juga diteliti pengaruhnya pada *carbon emission disclosure*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, afiliasi politik dan proporsi dewan komisaris terhadap *carbon emission disclosure*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*?
- 2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*?
- 3) Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*?
- 4) Apakah afiliasi politik berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*?

- 5) Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.
- 2) Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.
- 3) Untuk menguji secara empiris apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.
- 4) Untuk menguji secara empiris apakah afiliasi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.
- 5) Untuk menguji secara empiris proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang teoritis dan praktisi :

- 1) Teoritis
 - a. Penelitian ini mampu memberi pemahaman dan penjelasan mengenai *carbon emission disclosure* dengan menggunakan teori legitimasi, teori sinyal, teori *stakeholder* dan teori *power*.

- b. Memberi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *carbon emission disclosure*, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2) Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan *carbon emission disclosure*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dan membantu memahami pengungkapan informasi yang berkaitan dengan emisi karbon (mengapa mereka perlu mengungkapkan hal tersebut) sebagai dasar penentuan pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan.